



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **URAY GAPIMA APRIANTO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **84491**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 264.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, VARIO SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, VARIO SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, VARIO SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000



6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.063.865

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.014.413.865

III. HUTANG Rp. 524.280.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.490.133.865

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.